

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara mulai dari Pejabat Eselon III ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggung-jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, Karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Uraian di atas menunjukan bahwa Pemerintah Kota Sibolga wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Perencanaan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Akuntabilitas kinerja, sehingga dapat mengetahui

sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun 2024. Penyusunan LKIP bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010.

Perubahan Strategi di segala bidang dalam skala nasional menghasilkan konsepsi perubahan dari suatu penyusunan rencana pembangunan yang bersifat Top Down planning menjadi bottom up planning dalam bentuk Forum Musrenbang untuk mewujudkan kualitas perencanaan yang partisipatif, aspiratif, jujur dan berani untuk transparan dengan mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mendorong keinginan guna mempelancar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air, serta agar terciptanya hubungan kerja yang serasi dan seimbang antara organisasi, baik dipusat maupun didaerah, upaya dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab terus dikembangkan atas dasar dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan secara Profesional, realistis perlu didukung dengan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit kerja.

Dalam mendalami kompetensi, mutlak diperlukan staf dan pimpinan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam dalam mengkaji berbagai persoalan yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga serta dalam pelaksanaan tugas Perencanaan, kompetensi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga mutlak diperlukan, karena memegang peranan yang sangat penting untuk meyakinkan agar Pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan umum sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.

1.2 Gambaran Singkat Organisasi Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, maka Dinas PMK, PP & PA Kota Sibolga merupakan suatu Lembaga Tekhnis Daerah Kota

Sibolga, Dinas PMK, PP & PA Kota Sibolga adalah sebuah instansi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sibolga.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor: 13 Tahun 2017, tanggal: 12 Januari 2017 tentang OPD Dinas PMK, PP dan PA sebagai Kedudukan, susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga memiliki struktur sbb :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Subbag Umum,Kepegawaian dan perlengkapan
4. Subbag Program dan Keuangan
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan
7. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan hak anak
8. Seksi Kelembagaan Masyarakat
9. Seksi Partisipasi dan Ketahanan Masyarakat
10. Seksi Pengembangan Ekonomi,SDA dan TTG
11. Seksi Peningkatan Kualitas hidup Perempuan
12. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
13. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
14. Seksi Sistem Data Gender dan anak
15. Seksi Pemenuhan Hak Anak (PHA)
16. Seksi Perlindungan Khusus Anak

• **Jumlah Pegawai:**

Jumlah Pegawai Dinas PMK,PP & PA Kota Sibolga sebanyak 40 orang terdiri dari :

- | | |
|---|------------|
| 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 20 orang |
| 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | : 1 orang |
| 3) Tenaga Harian Lepas (THL) | : 21 orang |

Jumlah	: 42 orang
--------	------------

• **Kualifikasi pendidikan :**

Sebagai sebuah lembaga teknis daerah, Dinas PMK,PP & PA Kota Sibolga menyadari bahwa kapabilitas sumber daya manusia yang kualified dan berkemampuan dalam tugasnya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan Dinas PMK,PP & PA Kota Sibolga dalam pencapaian tujuannya.

Kepala Dinas PMK,PP & PA Kota Sibolga mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap memprioritaskan kualitas aparaturnya, baik melalui peningkatan jenjang pendidikan lanjutan maupun melalui pendidikan dan latihan (diklat) teknis dan fungsional, yang kesemuanya dapat dicapai dengan dukungan Pemerintah Kota Sibolga. Secara umum tingkat pendidikan staf Dinas PMK, PP & PA Kota Sibolga masih tergolong cukup, dimana komposisi untuk Sarjana (S1) lebih mendominasi.

Adapun kualifikasi pendidikan Dinas PMK,PP & PA Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	SMA /SMK	14
2	D2	1
3	D3	3
4	S1	18
5	S2	6
	Jumlah	42

Sumber : Sekretariat Dinas PMK,PP dan PA

Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas PMK,PP & PA Kota Sibolga dalam jabatan struktural adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II	Pembina (IV/b)	1
2	Eselon III	Pembina (IV/a)	1
3	Eselon III	Penata Tk.I (III/d)	3
4	Eselon IV	Penata Tk. I (III/d)	4
5	Eselon IV	Penata (III/c)	5
6	Eselon IV	Penata Muda Tk. I (III/b)	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2024

7	Staf	Penata Tk. I (III/b)	2
8	Staf	Penata Muda (III/a)	2
9	Staf	Pengatur Muda Tk.I (II/c)	1
TOTAL			20

Dengan jumlah personil tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekretaris daerah. Dalam kedudukannya tersebut Kepala Dinas PMK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II, dan seorang Sekretaris, Eselon III dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang Eselon III dan dibantu 11 (sebelas) orang pejabat eselon IV yang masing-masing terdiri dari :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pangkat (Golongan)	Kualifikasi Pendidikan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	ROSIDAH LUBIS, SS NIP. 19821229 200604 2 007	Kepala Dinas	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2	PR
2	ENDANG BASARIA HUTAGALUNG, SE, MM NIP. 19800822 200312 2 007	SEKRETARIS	Pembina (IV/a)	S-2	PR
3	BAHANI INDAH HAPSARI, S.A.P NIP.19830424 200604 2 004	Kabid PMK	Penata Tk. I (III/d)	S-2	PR
4	ROSMATIO VELDA PANGGABEAN,S.Sos NIP. 19790507 200312 2 005	Kabid PP	Penata Tk. I (III/d)	S-1	PR
5	EVA JUNIARTI HUTABARAT, A.Md NIP.19750628 200212 2 006	Kabid PA	Penata Tk. I (III/d)	D-3	PR
6	KHOIRUDDIN SYARIF HASIBUAN, SH NIP. 19890513 201507 1 001	Kasubbag Program dan Keuangan	Penata (III/c)	S-1	LK
7	MILDA SARTIKA PASARIBU NIP. 19820821 201112 2 001	Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan	Penata Tk. I (III/d)	S-1	PR
8	RAFIKAYANI PANGGABEAN,SE NIP. 19790925 200212 2 004	Kasi Peningkatan kualitas keluarga	Penata (III/c)	S-1	PR
9	DIANA EVELINA MALAU, A.Md NIP. 19810815 200312 2 003	Kasi Peningkatan KHP	Penata Tk. I (III/d)	S-1	PR
10	APRINA BUGIS,SE,M.M NIP.19750416 199402 2 001	Kasi Perlindungan hak perempuan	Penata Tk. I (III/d)	S-2	PR
11	RISDAWATI SITUMEANG,SKM NIP.19810705 200502 2 011	Kasi Sistem Gender dan anak	Penata (III/c)	S-1	PR
12	GANDA A.SITOHANG, S.Sos NIP.19851015 201101 1 016	Kasi Pemenuhan Hak anak	Penata (III/c)	S-1	LK
13	FRANATA RITTAR YANTO SAMOSIR, SE NIP. 19880409 201507 1 001	Kasi Kelembagaan Masyarakat	Penata Muda Tk.I (III/c)	S-1	LK
14	ORITA RENTA D.U SIPAHUTAR, SH NIP. 19820924 200701 2 001	Kasi Perlindungan Khusus Anak	Penata Tk. I (III/d)	S-2	PR
15	MUKTIONO, S.Sos, I, M.Si	Kasi Perlindungan	Penata	S-2	LK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2024

	NIP. 19771219 201101 1 003	Khusus Anak	(III/d)		
16	ANGGRIANI KARTINI JULIANNA, S.I.Kom NIP.19840130 201101 1 009	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	S-1	PR
17	PORNICA HUTAGALUNG NIP. 19760415 200312 2 005	Staf	Penata Muda (III/a)	SMA	PR
18	LENNI ELFRIDA SIMORANGKIR NIP.19800614 201507 2 001	Staf	Pengatur (II/c)	SMK	PR
19	NUR ASYIAH NASUTION, A. Md NIP.19820117 201001 2 012	Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)	D-3	PR
20	MUHAMMAD RASYID MANALU, S.Pd NIP.19800614 201507 2 001	Staf	Pembina (IV/a)	S-1	LK
21	MUTIA SANDRA SIREGAR, SE 19921210 202421 2 016	PPPK	GPL IX	S-1	PR
22	NASRAN BASRI, SE	T H L	---	S-1 Ekonomi	LK
23	ROHIDA SIGALINGGING	T H L	---	SLTA	PR
24	SIHOL MARUDUT HUTAPEA	T H L	---	SLTA	LK
25	SAUT MARTUA PURBA	T H L	---	SLTA	LK
26	EFENDI MANALU	T H L	---	SLTA	LK
27	YUSUF SUTRISNO	T H L	---	SLTA	LK
28	JENNI RAHMAWATI	T H L	---	SLTA	PR
29	DOARTHA RUTMIKA SINAGA	T H L	---	SLTA	PR
30	NURHEYKA NANIA PURBA	T H L	---	S-1 Pendidikan	PR
31	JULIANA	T H L	---	S-1 Pendidikan	PR
32	JUSEPLIN SILITONGA	T H L	---	SLTA	PR
33	WIKE PUSPITASARI	T H L	---	SLTA	PR
34	NOVRIDA YANTI CANIAGO	T H L	---	SLTA	PR
35	IKWAN HIDAYAT SIMATUPANG, S.Sos	T H L	---	S-1 Sosial	LK
36	RAFSANJANI	T H L	---	D-2 Perikanan	LK
37	SELPI HANDAYANI SILALAH	T H L	---	S-1 Pendidikan	PR

38	DANIEL R. TOGI BATUBARA	T H L	---	SLTA	LK
39	SITI SUARNITA ZAI	T H L	---	S-1 Ekonomi	PR
40	IRAMA MERDI	T H L	---	S-1 Teknik	LK
41	ZAKYAH LUBIS, SH	T H L	---	S-1 Hukum	PR
42	TRI WAHYUNI	T H L	---	SLTA	PR

Sumber: Sekretariat Dinas PMK,PP dan PA

SARANA DAN PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas PMK,PP dan PA Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut :

No	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN			ket
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ac	13	9		4	
2	AlatPemadam Kebakaran	1	1			
3	Brankas	2	1		1	
4	Cctv	1	-		1	
5	Digital	1	1			
6	DVD/DV3	1	-		1	
7	Faksmile/Pesawat Telephone	3	2		1	
8	FeelingKabinet	9	8		1	
9	Generator	2	1	1		
10	Gorden	4	3		1	
11	Gps	1	1			
12	SepedaMotor Matic	3	3			
13	SepedaMotor	1	1			
14	Infokus	2	2			
15	Kamera	1	1			
16	Karpet	1	1			
17	Keyboard	1			1	
18	KipasAngin	10	7		3	
19	KomputerSet	11	6		5	
20	Kulkas	3	2		1	
21	KursiKerjaEselon/Kursi Kerja Pegawai	33	31		2	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2024

22	KursiPelatihan	62	52		10	
23	Kursi Rapat	77	12		65	
24	KursiTamu	1	1			
25	Laptop	22	11		11	
26	Almari	1	1			
27	Lemari2Pintu/Expo/LemariBerkas	22	18		4	
28	Meja1/2Biro/Meja Kerja Pegawai	35	33		2	
29	MejaMakan	1	1			
30	MejaRapat	1	1			
31	Meja RapatHpl	1	1			
32	MesinAbsensi	2	1		1	
33	MesinPenghancurKertas	1	1			
34	MesinPenghisapDebu	1	1			
35	MicToa	1			1	
36	MicWireless	1			1	
37	Mobil	1	1			
38	MobilDinas1000CcDaihatsuX	1	1			
39	ModelKapal	1			1	
40	PapanTulisMobiler	1	1			
41	Parabola	2	1		1	
42	PemasanganJaringanInternet	1	1			
43	JamDinding	3			3	
44	Podium	1	1			
45	Printer	25	10		15	
46	Sofa	2	1		1	
47	TempatTidur	4	3		1	
48	PenggilingPeletIkan	3	3			
49	PlankDinasPMK,PPDanPA	1	1			
50	PlankNamaDPC LPM	3			3	
51	Plank/NeonBoxDPDLPM	1	1			
52	Plank/NeonBoxKantor	1	-		1	
53	RuningText	1	1			
54	SoundSytem	1	1			
55	SwitchHub	1	1			
56	Televisi	3	3			
57	TempatBunga/Pot	1			1	
58	UPS / Stabilizer	4	2		2	
59	AlatPembuatIkanPelet	1	1			
60	AlatPengerengSerbaguna	1	1			
61	WhiteBoard/PapanStrukturPMK	1	1			
62	WifiExternal	2	2			

63	Stop Watch	4	4			
64	Dispenser	1	1			

Sumber: Sekretariat Dinas PMK, PP dan PA

1.3 DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/diikhtisarkan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan berapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Wali Kota Sibolga yang hendak dicapai pada masa jabatan periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”**

Sedangkan Visi Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga adalah :
“Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menuju Masyarakat Yang Sehat, Pintar Dan Makmur”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka akan dilakukan misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Administrasi dan Ketatausahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
2. Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Dan Kelembagaan Masyarakat Menuju Ketahanan Masyarakat.
3. Tercapainya peningkatan Angka Indeks Pembangunan Gender dan Angka Indeks Pemberdayaan Gender;
4. Terpenuhinya Indikator dalam mewujudkan Kota Layak Anak;
5. Terhapusnya Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan perlindungan perempuan dan anak.

2.1.2 TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga adalah :

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan program dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
2. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat

3. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat dalam Memberhasilkan Program
4. Meningkatkan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam Membangun Keluarga secara Partisipatif
5. Meningkatkan Peran Perempuan di Kelurahan
6. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan
7. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Proses Politik dan Jabatan Publik
8. Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
9. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
10. Meningkatkan Pelaksana memperkuat Kelembagaan
11. Pengarusutamaan Gender

2.1.3 STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam kebijakan dan program meliputi:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama terpadu dengan Instansi/Lembaga terkait, kalangan Perguruan Tinggi, dunia usaha dan masyarakat
2. Memfasilitasi dan mendorong prakarsa dan kemandirian masyarakat/lembaga yang ada di Kelurahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan Kemampuan dan Etos Kerja Aparatur di Lingkungan Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga Agar Mampu dan berdisiplin dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4. Meningkatkan Perlindungan Anak Dan Perempuan Untuk Akses Pelayanan Tumbuh Kembang Anak
5. Meningkatkan Review, Koreksi dan Harmonisasi Terhadap Undang Undang hingga Peraturan Daerah (Perda) Bersepektif Gender
6. Mendukung Percepatan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Untuk Perlindungan Anak dengan Berkebutuhan Khusus

7. Meningkatkan Survey Tentang Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Sebagai Bagian Dari Komitmen
8. Meningkatkan Koordinasi Dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian dan Lembaga berkaitan lainnya
9. Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah juga mengerti tentang Perlindungan Khusus Kekerasan Terhadap Anak

2.1.4 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kebijakan Dinas PMK,PP dan PA Kota Sibolga adalah “ **Menghapus segala Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak serta Mengembangkan Kemandirian Masyarakat dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat melalui Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Politik** ”.

2.2. SASARAN DAN INDIKATOR

Tujuan 1 : Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi birokrasi Meningkatnya Pelayanan masyarakat	- Mutu tata kelola pemerintahan semakin baik dan transparan - Persentase peningkatan pegawai yang telah mengikuti pelatihan - Tingkat capaian kinerja daerah - Indeks kepuasan masyarakat

Tujuan 2: Koordinasi dengan OPD Untuk Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
OPD yang melaksanakan PUG Kota Sibolga	- Jumlah peserta dalam OPD yang melaksanakan PUG

Tujuan 3 : Meningkatkan SDM kaum Perempuan melalui kualitas hidup keluarga

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya Indikator APE	- Peningkatan jumlah Indikator

Tujuan 4 : Meningkatnya indeks Pembangunan manusia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
- Angka harapan hidup pada saat lahir (e) laki-laki dan perempuan - Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah : laki-laki dan perempuan - Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan	- Jumlah angka harapan hidup saat lahir - Jumlah Harapan lama sekolah - Jumlah perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan

Tujuan 5 : Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
- Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan - Proporsi dari manager, staf administrasi pekerja profesional dan teknis, laki-laki dan perempuan - Upah buruh non Pertanian, laki-laki dan perempuan	- Jumlah keterwakilan parlemen laki-laki dan perempuan - Jumlah Proporsi dari manager, staf administrasi pekerja dan teknis, laki-laki dan perempuan - Jumlah upah buruh non Pertanian, laki-laki dan perempuan

Tujuan 6 : Meningkatnya Peran Perempuan di Kelurahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
- Terlaksananya program peningkatan ekonomi keluarga melalui perempuan	- Kelompok dan perorangan diberikan pelatihan untuk peningkatan ekonomi keluarga - Jumlah kelompok dasawisma yang terbentuk dalam menunjang ekonomi keluarga - Jumlah peserta yang sudah dilatih dalam keterampilan

Tujuan 7 :Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Untuk Menuju Kota Layak Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
- Anak-anak (0-18thn)	- Jumlah nilai Indikator dalam pencapaian Kota Layak Anak - Persentase peningkatan nilai indikator Kota Layak Anak

Tujuan 8 : Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
- Anak berkebutuhan khusus	- Jumlah penanganan anak berkebutuhan khusus - Persentase dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang mendapat perlindungan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/ unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Perjanjian ini ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

2.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka menengah

Indikator Kinerja		Capaian 2023	Capaian 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2024
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Mutu Tata Kelola Pemerintahan semakin baik dan transparan	100	80	80	100	100	100
	Persentase Peningkatan Pegawai berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana	80	30	22	73,34	100	73,34
Koordinasi dengan OPD untuk meningkatnya kualitas hidup perempuan	30 OPD yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender	100	30	30	100	100	100
	Jumlah peserta dalam OPD yang melaksanakan PUG	100	30	27	90	70	90
Meningkatkan SDM kaum Perempuan melalui kualitas hidup keluarga	Bimbingan dan pendampingan bagi perempuan untuk memiliki industri rumahan	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Perempuan yang memiliki home industri	100	90	40	45	80	45
Meningkatnya Peran perempuan di Kelurahan	Kelompok dan perorangan diberikan pelatihan untuk peningkatan ekonomi keluarga	100	100	100	100	100	100

	Jumlah kelompok dasawisma yang terbentuk dalam menunjang ekonomi keluarga	100	90	60	66	100	100
	Jumlah peserta yang sudah dilatih dalam keterampilan	100	90	60	66	100	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak untuk Sibolga menuju Kota Layak Anak	Peningkatan nilai indikator	100	100	100	100	100	100
	Jumlah nilai indikator dalam Pencapaian Kota Layak Anak	100	800	800	100	100	100
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Penanganan anak berkebutuhan khusus	100	100	100	100	100	100
	Persentase dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang mendapat perlindungan	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Sibolga

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Anak di Kota Sibolga	- Indek Pembangunan Gender	97,93
		- Indek Kesetaraan gender	74,53
2	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat Kelurahan menuju masyarakat yang sehat, pintar dan makmur	- Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik	- 100 %
		- Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)	- 22 Unit
		- Jumlah kelompok binaan PKK	- 22 Unit
		- Meningkatnya Partisipasi dan Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat	- 100 %
3	Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju Masyarakat yang sehat, pintar dan makmur	- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	- 20%
		- Proporsi kursi yang diduduki oleh Perempuan di DPRD	25%
		- Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	5620 orang

		- Rasio KDRT	3%
		- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	26,42%
		- Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	5kasus
		- Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bln terakhir)	1kasus
		- Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	3kasus
		- Angka harapan hidup pada saat lahir laki-laki dan perempuan	97,93%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	85%
		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam hal ini akan diuraikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga Tahun 2024, untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga Tahun 2021-2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja 2024, selain itu dibahas pula Akuntabilitas Keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga dalam rangka Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga .

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja organisasi dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Nilai Angka	Kategori
> 85 s/d 100	Memuaskan
> 75 s/d 85	Sangat Baik
> 65 s/d 75	Baik
> 50 s/d 65	Cukup Baik
> 30 s/d 50	Agak Kurang
0 s/d 30	Kurang

Adapun capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Sibolga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA ESELON II,III dan IV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SIBOLGA
TAHUN 2023**

No	Subbag/Subbid/Kaseksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sekretaris	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	12 bulan	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2024

No	Subbag/Subbid/Kaseksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
		- RKBMD	1 Dok	1 Dok	100
		- Pemeliharaan barang inventaris	12 Bulan	12 Bulan	100
		- Laporan inventaris barang	2 Laporan	2 Laporan	100
		Laporan LHKPN	6 Pegawai	6 Pegawai	100
		- Pelayanan dan Evaluasi kepegawaian - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	12 Bulan 10 Pegawai	12 Bulan -	100 0
		Laporan IKM, Laporan LHKPN	2 Laporan	2 Laporan	100

No	Subbag/Subbid/Kaseksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Subbagian Program dan Keuangan	Dokumen RKPD 2024 dan RKA/RKPA 2024 dan DPA/DPPA 2024	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Dokumen evaluasi Renstra dan Renja 2024	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja 2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Dokumen LKjIP 2024, LPT 2024, LPPD 2024, LKPJ 2024 Evaluasi RKPD 2024	5 Dokumen 4 Triwulan	5 Dokumen 4 Triwulan	100 100
		Laporan urusan tata laksana keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Laporan Perbendaharaan dan gaji	12 Bulan	12 Bulan	100
		Laporan verifikasi dan akuntansi	12 Bulan	12 Bulan	100
		Dokumen laporan keuangan 2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100
No	Subbag/Subbid/Kaseksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	- Jumlah partisipasi masyarakat	17 Kel	17 Kel	82 %
		- Jumlah Kelurahan yang mengikuti Evaluasi	17 Kel	17 Kel	100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Tahun 2024

		Pengembangan Kelurahan			
		- Jumlah partisipasi Kelembagaan masyarakat Kelurahan	21 kel/kec	21 kel/kec	100 %
		- Jumlah partisipasi Kelurahan yang ikut serta dalam pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17 kel	17 kel	100
		- Terlaksananya Partisipasi dalam kegiatan PKK	17 Kel	17 Kel	100

No	Subbag/Subbid/Kaseksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	- Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		- Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

No	Subbag/Subbid/Kaseksi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
6	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	- Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		- Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100

		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
		- Terlaksananya Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		- tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 kegiatan	1 kegiatan	100

3.1.1 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum. Beberapa tujuan serta sasaran strategis yang terkait dalam analisis ini, adalah

Tujuan 1 : Menerapkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas SDM	- Mutu Tata Kelola Pemerintahan semakin baik dan transparan	80	100	80	81
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi birokrasi	- Persentase Peningkatan Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan	0	0	0	0
Meningkatnya Pelayanan masyarakat	- Indeks kepuasan masyarakat	82	82	82	82

Berdasarkan pengukuran sasaran 1 dan 2 pada indikator kinerja tentang mutu tata kelola pemerintahan semakin baik dan transparan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga sudah mencukupi untuk menduduki jabatan dan serta pendidikan yang memadai sesuai tuntutan pekerjaan ada sehingga tercapai target dengan pencapaian sebesar 80 %.

Dalam hal kekurangan dalam memberikan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan pelayanan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga Tahun 2023 dan 2024 itu dikarenakan adanya penurunan anggaran, maka anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak maksimal dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga sehingga kurang mendukung aktivitas aparatur, dan untuk kelancaran pelayanan ke masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Gedung Kantor Dinas PMKPPPA dalam keadaan kurang representatif sehingga Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI Kedinasan kurang efektif
2. Belum terbentuknya struktural UPTD Penanganan Kasus Perempuan dan Anak sehingga kurang optimalnya kualitas perlindungan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Belum optimalnya peran Dasawisma di tingkat kelurahan, sehingga tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat masih rendah.

Tujuan 2 : Koordinasi dengan OPD untuk meningkatnya kualitas hidup perempuan

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
OPD yang melaksanakan PUG Kota Sibolga	Jumlah peserta dalam OPD yang melaksanakan PUG	90%	30	27	90%

Capaian kinerja meliputi OPD yang melaksanakan PUG dengan capaian secara keseluruhan 90%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat Kelurahan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga tahun 2024 tercapai.

Tujuan 3 : Meningkatkan SDM kaum perempuan melalui kualitas hidup keluarga

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7
Terpenuhinya Indikator APE	Peningkatan jumlah Indikator	100%	100	100	100 %

Berdasarkan pengukuran sasaran diatas pada indikator hasil pelaksanaan realisasi kinerja sampai tahun 2023 mencapai 100 %, dan untuk tahun 2024 tetap bisa tercapai 100%, akan tetapi tidak mendapat penghargaan APE lagi.

Tujuan 4 :Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2	4	5	6	7
- Angka harapan hidup pada saat lahir (e) laki-laki dan perempuan - Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan,rata-rata lama sekolah : laki-laki dan perempuan - Perkiraan pendapatan lakilaki dan perempuan	- Jumlah angka harapan hidup saat lahir - Jumlah Harapan lama sekolah - Jumlah perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan	60%	97,73	100	80%

Capaian kinerja meliputi indikator meningkatnya indeks pembangunan manusia tahun 2023 dengan capaian secara keseluruhan rata-rata 60 %, Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga tahun 2024 telah tercapai 80 %, keberhasilan pencapaian sasaran diatas tidak lepas dari terlaksananya program peningkatan indeks pembangunan manusia untuk tahun 2024 karena terjadi Depisit Anggaran.

Tujuan 5 : Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2		4	5	6
- Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan - Proporsi dari manager, staf administrasi pekerja profesional dan teknis, laki-laki dan perempuan - Upah buruh non Pertanian, laki-laki dan perempuan	- Jumlah keterwakilan parlemen laki	80%	73,53	80	80 %
	- Jumlah Proporsi dari manager, staf administrasi pekerja dan teknis, laki	40%	73,53	40	40 %

Capaian kinerja meliputi indikator meningkatnya indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 dengan capaian secara keseluruhan rata-rata 80%, Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga tahun 2024 telah tercapai 80 %, keberhasilan pencapaian sasaran diatas tidak lepas dari terlaksananya Program peningkatan indeks Pemberdayaan Gender untuk tahun 2024.

Tujuan 6 : Meningkatnya Peran Perempuan di Kelurahan

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2		4	5	6
- Terlaksananya Program peningkatan ekonomi keluarga melalui perempuan	- Kelompok dan perorangan diberikan pelatihan untuk peningkatan ekonomi keluarga	80 %	100 %	80	80 %
	- Jumlah kelompok	80%	60 Kel	48 Kel	80%

	dasawisma yang terbentuk dalam menunjang ekonomi keluarga				
	- Jumlah peserta yang sudah dilatih dalam keterampilan	80%	60/17 Kel	48/17 Kel	80%

Capaian kinerja meliputi indikator meningkatnya peran perempuan di Kelurahan dengan capaian secara keseluruhan rata-rata 80 %, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga tahun 2024 target capaian 80 %.

Tujuan 7 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak untuk menuju Kota Layak Anak

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2		4	5	6
Anak-anak (0-18thn)	- Jumlah nilai indikator dalam pencapaian Kota Layak Anak	80	900	800	80 %
	- Persentase peningkatan nilai indikator Kota Layak Anak	80	900	800	80 %

Permasalahan yang di hadapi dalam pemenuhan hak anak ini adalah bagaimana caranya agar menaikkan angka pada indikator Kota Layak Anak dari Madya menjadi Nindya, sehingga masih kurangnya pengetahuan OPD mengenai Indikator Kota Layak Anak Madya yang harus dipenuhi oleh OPD masing-masing. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga terus berupaya menyurati dengan

memberikan indikator Kota Layak Anak ke OPD se-Kota Sibolga, baik itu instansi vertikal lainnya yang menjadi stokeholder dalam pencapaian Kota Layak Anak dengan kategori Nindya.

Solusi yang diambil dari permasalahan ini dengan melakukan peningkatan pengetahuan dan koordinasi antar OPD se-Kota Sibolga dan instansi vertikal yang menjadi stakeholder agar dapat memenuhi indikator Kota Layak Anak dengan kategori Nindya sehingga Sibolga menjadi Kota Layak Anak.

Tujuan 8 : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

SASARAN	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024		
			Target	Realisasi	%
1	2		4	5	6
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	- Jumlah Penanganan anak berkebutuhan khusus	100	100	100	100 %
	- Persentase dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang mendapat perlindungan	80	100	80	80 %

Capaian kinerja meliputi indikator meningkatnya Perlindungan khusus anak mendukung menuju Kota Layak Anak dengan capaian secara keseluruhan mencapai 100 %. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga tahun 2024 telah tercapai 100 %.

Permasalahan yang di hadapi dalam pemenuhan hak anak ini adalah bagaimana caranya agar menaikkan angka pada indikator Kota Layak Anak dari Madya menjadi Nindya, sehingga masih kurangnya pengetahuan OPD mengenai Indikator Kota Layak Anak Madya yang harus dipenuhi oleh OPD masing-masing.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga terus berupaya menyurati dengan memberikan indikator Kota Layak Anak ke OPD se-Kota Sibolga, baik itu instansi vertikal lainnya yang menjadi stakeholder dalam pencapaian Kota Layak Anak dengan kategori Nindya. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga agar terpenuhinya indikator Kota Layak Anak dengan kategori Nindya menyediakan tempat – tempat khusus anak sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan Sibolga Kota Layak Anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja persasaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Persasaran

Pengukuran pencapaian sasaran dari program – program yang dilaksanakan Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga dapat dilihat pada table berikut :

No.	Sasaran	Skala Pengukuran				AK	K	Ket
		M	SB	B	CB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√	-	-	-	-	-	-
2.	Terlaksananya Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	√	-	-	-	-	-
3.	Terlaksananya Program Perlindungan Perempuan	√	-	-	-	-	-	-

4.	Terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	√	-	-	-	-	-
5.	Terlaksananya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	√	-	-	-	-	-	-
6.	Terlaksananya Program Perlindungan Khusus Anak	√	-	-	-	-	-	-
7.	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa	√	-	-	-	-	-	-
8.	Terlaksananya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	√	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

M = Memuaskan

SB = Sangat Baik

B = Baik

CB = Cukup Baik

AK = Agak Kurang

K = Kurang

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan berhasil. Keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang.

Saat ini di Kota Sibolga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah melaksanakan pengaduan

layanan kekerasan perempuan dan anak yang ditangani langsung oleh Bidang yang berwenang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, dan juga wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan – kegiatan lainnya serta menyediakan layanan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis, dan pelayanan rehabilitasi sosial, trauma healing, dimana korban kekerasan dimaksud dapat ditampung di Rumah Aman selama lebih kurang 7 hari sebagai tempat berlindung hingga mendapat titik temu dalam permasalahan yang dihadapi, ***tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga terus berupaya agar terbentuknya UPTD Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Sibolga, maka untuk itu, adapun langkah yang dilakukan yaitu sudah dikeluarkannya Peraturan Walikota Kota Sibolga Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sibolga, dan sudah dikeluarkan PERATURAN WALIKOTA NOMOR 06 TAHUN 2024 tanggal 31 Januari 2024 sedangkan untuk Kebijakan Daerah tentang Forum Anak Kota Sibolga sudah dimuat dalam PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 tanggal 31 Desember 2023 dan juga kebijakan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dimuat dalam PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 tanggal 30 Desember 2023, dan untuk tahun 2025 akan dilakukan pengisian formasi pada struktur organisasi UPTD tersebut agar dalam melakukan pelayanannya lebih maksimal.***

3.1.2 Tugas dan Fungsi

1. Melakukan upaya preventif (Pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan :
 - a. Penyuluhan, Kampanye atau Pendidikan lainnya kepada publik
 - b. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan.

- c. Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Ekonomi, Politik, Sosial dan budaya.
 - d. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan upaya kurative (Penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
 - a. Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan
 - c. Memfasilitasi pelayanan psikologi
 - d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
 - e. Memfasilitasi pelayanan bimbingan , rohani dan keagamaan
3. Melakukan upaya rehabilitative (Pemulihan)
 - a. Pemulihan Psikososial
 - b. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter
 - c. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi.
 - d. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan
 - e. Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial
 - f. Memfasilitasi proses pemulihan rohani.
 - g. Memfasilitasi proses trauma healing

3.1.3 Sarana dan Prasarana yang tersedia

1. Pelayanan Administrasi
2. Tersedia satu buah gedung sebagai tempat pelayanan korban kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di tingkat Kota Sibolga
3. Tersedia sarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan pendampingan korban
4. Tersedia tenaga untuk memberikan pelayanan pengaduan Perempuan dan Anak
5. Tersedianya rumah perlindungan untuk korban.

Cara Mendapatkan Layanan

1. Dapat secara langsung melapor ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
2. Dapat melapor melalui *Online* SIMFONI PPA, Hotline Service, sosial media (Fb, Instagram), dll.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, memiliki jumlah aparatur yang terdiri dari 42 orang dengan rincian : ASN berjumlah 20 orang, PPPK 1 orang dan THL 21 orang dengan keterbatasan keterampilan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.

3.1.4 Analisis Progam/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Dari capaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan Tahun 2024, terdapat 7 program dan 14 kegiatan pembangunan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2024, dapat dilihat pada uraian berikut :

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga Tahun 2021-2026 disusun mengacu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Program dan kegiatan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2020 dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

3) Program Perlindungan Perempuan

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

5) Program Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya, Hukum adat yang sama dalam Daerah/ Kota

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, dana yang dialokasikan TA. 2024 sebesar **Rp. 4,273,323,211,-** dengan perincian sebagai berikut :

KOTA SIBOLGA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

No		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,866,596,988.00	3,262,973,305.00	84.39%
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA	3,866,596,988.00	3,262,973,305.00	84.39%
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,372,442,528.00	3,028,146,686.00	89.79%
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,560,754,770.00	2,312,441,424.00	90.30%
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,560,754,770.00	2,312,441,424.00	90.30%
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248,438,392.00	221,023,352.00	88.97%
	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,918,100.00	8,917,500.00	99.99%
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,607,500.00	52,487,200.00	99.77%
	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,167,900.00	5,164,400.00	99.93%
	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,197,492.00	27,197,492.00	100.00%
	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,411,400.00	25,328,900.00	99.68%
	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,136,000.00	101,927,860.00	78.93%

	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425,448,920.00	368,198,730.00	86.54%
	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,700,000.00	2,676,000.00	99.11%
	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,548,920.00	43,322,730.00	58.11%
	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,200,000.00	322,200,000.00	92.53%
	2.13.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26,272,100.00	26,160,000.00	99.57%
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,527,100.00	19,415,000.00	99.43%
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	6,745,000.00	6,745,000.00	100.00%
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,528,346.00	100,323,180.00	89.95%
	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,514,550.00	43,928,380.00	90.55%
	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,950,000.00	15,930,000.00	99.87%
	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,063,796.00	40,464,800.00	85.98%
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	58,499,510.00	-	0.00%
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58,499,510.00	-	0.00%
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	58,499,510.00	-	0.00%
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	151,221,725.00	92,359,023.00	61.08%
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,739,673.00	50,739,273.00	100.00%
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,739,673.00	50,739,273	100.00%
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65,982,262.00	7,869,960.00	11.93%

	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	65,982,262.00	7,869,960.00	11.93%
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,499,790.00	33,749,790.00	97.83%
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34,499,790.00	33,749,790	97.83%
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	29,654,950.00	25,011,050.00	84.34%
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29,654,950.00	25,011,050.00	84.34%
	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29,654,950.00	25,011,050.00	84.34%
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	254,778,275.00	117,456,546.00	46.10%
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85,280,535.00	80,371,784.00	94.24%
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	34,520,000.00	32,780,700.00	94.96%
	.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50,760,535.00	47,591,084.00	93.76%
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169,497,740.00	37,084,762.00	21.88%
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169,497,740.00	37,084,762.00	21.88%
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	406,726,223.00	162,306,700.00	39.91%
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA	406,726,223.00	162,306,700.00	39.91%
1	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	70,029,210.00	62,826,650.00	89.71%

	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70,029,210.00	62,826,650.00	89.71%
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	70,029,210.00	62,826,650.00	89.71%
2	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	336,697,013.00	99,480,050.00	29.55%
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	336,697,013.00	99,480,050.00	29.55%
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	336,697,013.00	99,480,050.00	29.55%
Jumlah			4,273,323,211.00	3,425,280,005.00	80.15%

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan, bahwa capaian indikator kinerja utama memiliki nilai total 80,15%, Namun secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga dapat berjalan dengan baik, hal ini digambarkan dengan perolehan capaian.

3.3 KENDALA DAN SOLUSI

Berdasarkan Penilaian Capaian kinerja Kegiatan tersebut (Capaian Kinerja masukan, keluaran, hasil dan dampak) secara keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut berhasil dalam menunjang pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, namun demikian dibalik keberhasilan tersebut masih ada dijumpai kelemahan-kelemahan/kegagalan/hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas antara lain :

1. Masih Kurang Layaknya Gedung Kantor Dinas PMKPPPA Kota Sibolga;
2. Belum terisi formasi fungsional untuk UPTD Pelayanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak;

3. Masih Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat tentang Aturan dan Sanksi terkait Pelaku tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
4. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang antisipasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki Ketrampilan Khusus dalam menangani kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya Rehab total Gedung Dinas PMKPPPA Kota Sibolga;
2. Telah mengajukan Pengisian Formasi untuk Struktur Organisasi UPTD kepada Bapak walikota Sibolga;
3. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Aturan dan Sanksi terkait pelaku tindak Kekersasan terhadap Perempuan dan Anak;
4. Masih melakukan Kerjasama dengan Psikolog dari Luar Dinas PMKPPPA Kota Sibolga dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
5. Perlunya di adakan Bimbingan Teknis untuk OPD se Kota Sibolga terkait Perencanaan Penganggaran dan Penyusunan Anggran yang responsive Gender.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Secara umum kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga Tahun 2024, dapat dikatakan berhasil cukup baik, Akan tetapi dalam hal ini untuk tinjauan kedepan atas perubahan-perubahan pelaksanaan sangat diperlukan sistem pelaksanaan yang benar-benar dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kinerja. Dalam hal ini, LKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.

A. Tinjauan Khusus

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga sebagai suatu Unit Kerja Teknis pada Pemerintah Kota Sibolga yang dibentuk berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2008 yang memiliki tingkat pada Eselon II mempunyai tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan secara terperinci.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga merupakan unit kerja pendukung pelaksana kegiatan Program Pemerintah Kota Sibolga yang tertuang dalam Visi dan Misi serta rangkaian kegiatan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kota Sibolga. Dari analisis LKIP, yang diolah dari data perencanaan strategis hingga evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengukuran kinerja secara baik. Beberapa kendala dan tantangan yang masih memerlukan perbaikan di masa yang akan datang, yaitu berupa realisasi program (renstra) di dalam melaksanakan kegiatan kantor dengan alokasi dana yang benar-benar dapat direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu sumber daya manusia yang handal masih

merupakan kebutuhan yang perlu di benahi di dalam mendukung unsur pelaksana keberhasilan program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Sibolga, sehingga Visi dan Misi Kota Sibolga dapat terwujud dengan baik.

Demikian sajian LKIP ini diuraikan untuk dapat dijadikan evaluasi kinerja dimasa yang akan datang.

Sibolga, Februari 2025

KEPALA DINAS PMK, PP DAN PA KOTA
SIBOLGA



ROSIDAH LUBIS, S.S, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19821229 200604 2 007

